

# Kebutuhan Memilih Pemimpin Terbaik

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

**Selain rekam jejak, perhatian pemilih terhadap program kerja ditawarkan para kontestan, juga menjadi indikator penting menakar kualitas Cagub/Cawagub**

Sebagai tahapan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur, terdiri dari: (1). Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah (Gerinda, PAN, PKS, Golkar dan Hanura). (2). J.R. Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB dan PKPI). (3). Djanoat Syaiful Hidayat-Sibar Pangihutan Hamonangan Sitom (PDIP dan PPP). Para kandidat yang diusung oleh Partai politik (Partol), merupakan tokoh-tokoh terbaik dengan kualitas tidak diragukan berdasarkan pengalaman, profesi dan latar belakang berbeda untuk bertarung menuju Sumut satu.

Bicara tentang pemimpin terbaik atau kualitas calon Gubernur dan wakil gubernur (Cagub/Cawagub) merupakan persoalan prinsipil. Kualitas pemimpin menjadi dasar penilaian guna menakar kapabilitas Paslon layak atau tidak memimpin daerah ini. Kualitas pemimpin merupakan simbolis performance daerah berimplikasi kepada kemajuan daerah. Kualitas pemimpin juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Karena itu, memilih pemimpin berkualitas harus menjadi komitmen bersama dan Summit harus dipimpin oleh tokoh-tokoh terbaik pilihan rakyatnya, terlebih 14 juta jiwa rakyat Sumut akan menggantung harapan kepada pemimpin ke depan. Persoalannya, bagaimana menakar pemimpin itu terburuk/berkualitas atau tidak. Karena ini menyangkut person/privacy seseorang sulit dilakukan. Biasanya teori digunakan bersamaan dengan riset/survey dengan beragam indikator/pendekatan, meskipun hasilnya kadang-kadang melenceng dari tingkat akurasi. Namun karena ini dipandang sebagai kebutuhan, maka penilaian terhadap pemimpin terburuk menjadi penting sebagai indikator menakar apakah Paslon bersangkutan terburuk atau tidak memimpin Sumut.

Sebagai teori/pendapat banyak menggunakan indikator pemimpin terburuk, diadopsi

dari pendapat hukum, etika, kearifan lokal bahkan agama, kemudian dirumuskan menjadi prinsip dasar memilih pemimpin.

Dalam teori politik Islam (fikih syar'iy) misalnya, pemimpin (Umara/Ullah Amri) merupakan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Pemimpin juga disebut "Khadimul ummah" pelayan umat bukan pemimpin untuk dilayani. Hakikat seorang pemimpin tidak saja sekedar kontrak politik dengan konsituennya, tetapi juga terdapat ikatan perjanjian dengan Tuhan bahwa pimpinan yang dipergunakannya merupakan amanah Tuhan, karena dia telah dipilih oleh Tuhan dan dipandang cukup menjalankan amanah. Tugas pokok dan fungsinya dipandang sebagai tugas mulia di hadapan rakyat juga di mata Tuhan.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan agama, kemudian menjadi rumusan persyaratan harus melekat pada calon pemimpin: (1). Menilik kejujuran (2). Amanah (3). Kecerdasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak sehingga program kerja benar-benar terukur (4). Memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Prinsip-prinsip ini pun dipekerjakan oleh pakar seperti mengutip teori al-Mawardi (al-Ahkam ash Sulthaniyah) menegaskan pemimpin berkualitas memiliki syarat-syarat: (1). Bersikap adil (2). Menilik ilmu pengetahuan (3). Sehat jasmani yang tidak menghalangi melakukan tugas (4). Normal/tidak cacat (5). Bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan (6). Keberanian melindungi wilayah dari konflik atau kelompok tertentu yang menciptakan disharmonisasi daerah.

Semua indikator di atas, tidak sekedar teori berpolitik semata atau dibincangkan dalam kajian-kajian politik, tetapi jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan akan menjadi prinsip dasar memberikan arah pembangunan Sumut lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena prinsip-prinsip tersebut diadopsi dari semangat agama yang suci berorientasi kepada kemaslahatan umat. Artinya prinsip tersebut tidak hanya muncul dengan

sendirinya, tetapi menjadi bagian pesan-pesan keagamaan yang disepakati semua agama, sepakat menyatakan pemimpin terburuk (berkualitas) menjadi syarat mutlak untuk memilih. Oleh karena itu memilih pemimpin terburuk menjadi kebutuhan guna memperkuat kemaslahatan masyarakat dan daerah. Sebaliknya mengusung pemimpin tidak ber kualitas, justru membuka ruang terciptanya berbagai persoalan yang dapat mengancam kemajuan daerah. Kehawatiran ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi (Jika amanat telah disia-siakan tunggus saja kehancuran terjadi). Ada sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab "Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran itu" HR. Bukhari. Artinya realitas ini menjadi kemunginan bisa terjadi, dimana masyarakat membuat kesalahan besar dengan memilih pemimpin dimanakah kualitasnya masih dipertanyakan.

Kualitas para kandidat yang ada saat ini cukup diakui dan tidak diragukan lagi oleh masyarakat Sumut. Semua Paslon merupakan pemimpin hebat. Bukti kehebatan mereka telah teruji dari tahapan kompetisi yang mereka ikuti, hingga terpilih sebagai Paslon diusung oleh Partol yang sejak semula memiliki mekanisme penjaminan ketat dan rahasia. Sampainya mereka pada tahap kontestan merupakan prestasi dan reputasi luar biasa harus diakui oleh publik, jika dibandingkan kandidat lain semula berada pada posisi anaga, justru kenyataannya gagal menjadi kontestan. Dengan kata lain dalam konteks kualitas, terdapat hubungan bahwa kualitas kandidat cukup mempengaruhi mengantar mereka sebagai kontestan Pilgubus. Disamping berbagai pengalaman (Birokrat pengusaha, politisi, militer dan lainnya) menjadi modal dasar memperkuat kualitas eksistensi.

Ketika mereka dihadapkan kepada masyarakat pemilih, maka kualitas kepemimpinan mereka akan ditantang dan diuji, paling tidak para kontestan dihadapkan kepada epologi: (1). Terdapat masyarakat pemilih yang sejak dini sudah menentukan pilihannya berdasarkan pengetahuan terhadap ketokohan dan popularitas para kontestan.

(2). Adanya masyarakat pemilih telah memahaminya secara benar program kerja ditawarkan kontestan. (3). Terdapatnya masyarakat pemilih melihat kontestan

berdasarkan hubungan kolejial (Kekeabatan, suku dan ras). (4). Adanya kelompok masyarakat pemilih menentukan pilihan berdasarkan agama, sehingga agama mutlak dijadikan dasar tidak terantakan. (5). Adanya kelompok masyarakat pemilih mengembangkan karakter ketidakhannya siapa yang akan dipilih sehingga kategori ini selalu ikut-ikutan karena tidak mempunyai dasar pikiran untuk memilih.

Berhadapan dengan tipologi pemilih di atas, tidaklah sulit dibayangkan oleh para kandidat, jika pendekatan dan perhatian kepada masyarakat pemilih berbasis tampilan kualitas/prestasi. Begitu pula masyarakat pemilih memiliki kekuatan menentukan satu Paslon terburuk. Maka rekam jejak (track record) menjadi solusi penting mengiring pilihan kandidat terburuk/berkualitas. Rekam jejak menjadi acuan sebagai sebuah catatan berisi kumpulan dari capaian nyata (real performance) yang menggambarkan prestasi seseorang sebelumnya. Dengan mengetahui jejak baik sebelumnya, akan menjadi point strategis menentukan Cagub/Cawagub ke depan. Melakukan rekam jejak tidak sulit dilakukan, selama informasi-informasi positif didapatkan (bukan black campaign) atau bantuan teknologi dan informasi ditemukan (bukan hoax), semuanya cukup membantu memperkuat penilaian kualitas Cagub/Cawagub.

Selain rekam jejak, perhatian pemilih terhadap program kerja ditawarkan para kontestan, juga menjadi indikator penting menakar kualitas Cagub/Cawagub. Karena program kerja merupakan acuan sekaligus bentuk keseriusan para kontestan membangun Sumut ke depan.

Baik rekam jejak maupun telaah program kerja kontestan sesungguhnya memiliki peran luas kepada masyarakat pemilih guna menggunakan kekuatan untuk menentukan pemimpin daerah. Di sinilah masyarakat menilai/melakukan filterisasi memilih pemimpin terburuk, karena rakyat mempunyai kekuatan hak pilih untuk itu, sedangkan para kandidat tersebut dipilih dan diusung oleh rakyatnya. Sejatinya kecerdasan masyarakat menjadi penilai untuk menggunakan hak pilih, karena di genggaman adalah lahir pemimpin terburuk bagi daerah ini. Semogai